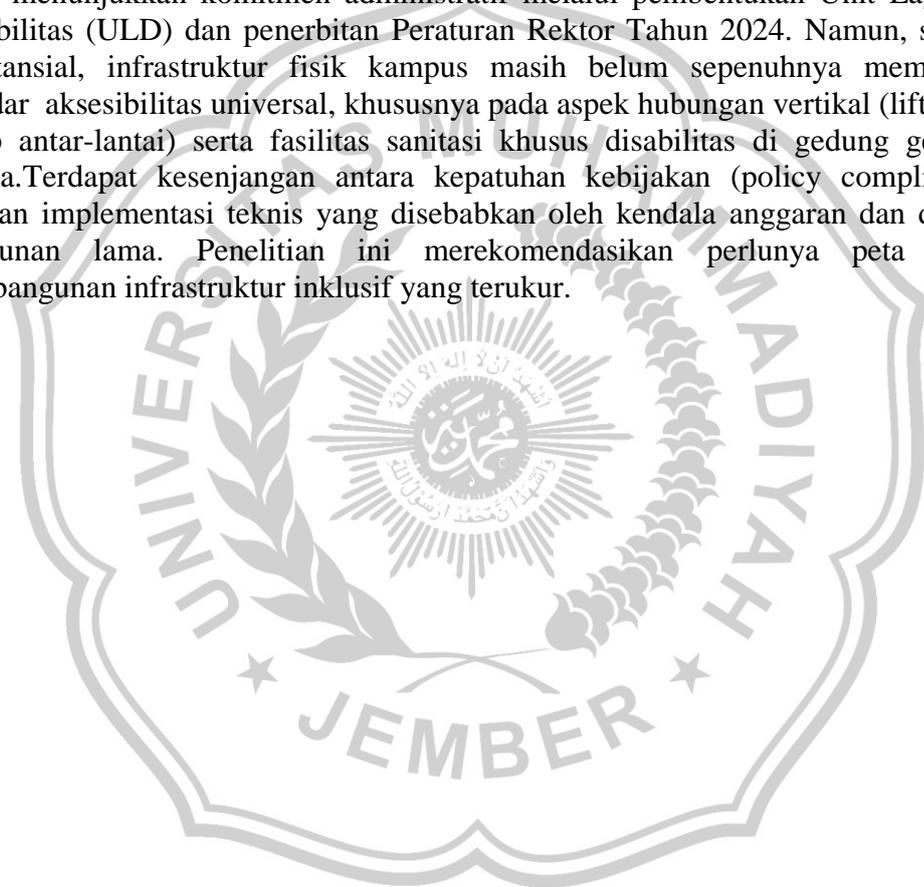


## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum Universitas Muhammadiyah Jember (UM Jember) dalam pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, ditinjau dari perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), penelitian ini mengevaluasi kesesuaian antara regulasi normatif dengan kondisi faktual di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UM Jember telah menunjukkan komitmen administratif melalui pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan penerbitan Peraturan Rektor Tahun 2024. Namun, secara substansial, infrastruktur fisik kampus masih belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas universal, khususnya pada aspek hubungan vertikal (lift dan ramp antar-lantai) serta fasilitas sanitasi khusus disabilitas di gedung gedung utama. Terdapat kesenjangan antara kepatuhan kebijakan (policy compliance) dengan implementasi teknis yang disebabkan oleh kendala anggaran dan desain bangunan lama. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peta jalan pembangunan infrastruktur inklusif yang terukur.



## **ABSTRACT**

*This research aims to analyze the legal responsibility of Universitas Muhammadiyah Jember (UM Jember) in fulfilling accessibility for persons with disabilities, examined through the lens of Government Regulation Number 13 of 2020 concerning Reasonable Accommodation for Students with Disabilities and the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 14/PRT/M/2017 concerning Building Accessibility Requirements. Employing an empirical juridical research method with a statute approach and a conceptual approach, this study evaluates the alignment between normative regulations and factual conditions. The findings reveal that UM Jember has demonstrated administrative commitment through the establishment of the Disability Service Unit (ULD) and the issuance of the 2024 Rector's Regulation. However, substantially, the campus physical infrastructure has not yet fully met universal accessibility standards, particularly regarding vertical connectivity (lifts and inter-floor ramps) and specialized sanitation facilities for disabilities in main buildings. There is a gap between policy compliance and technical implementation caused by budget constraints and legacy building designs. This research recommends the necessity of a measurable inclusive infrastructure development roadmap to guarantee equal educational rights for students with disabilities.*



